

ABSTRAK

Fenomena banyaknya masyarakat yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja, menimbulkan berbagai permasalahan. Hal ini dapat terjadi karena banyak faktor, salah satunya adalah masyarakat yang berangkat melalui jalur ilegal atau tidak resmi. Oleh karena itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah melimpahkan kekuasaan dan kewenangan mengenai perlindungan terhadap masyarakat yang akan, sedang, atau telah menjadi Pekerja Migran Indonesia kepada pemerintah daerah. Maka, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengemban tugas melakukan perlindungan dan pengawasan. Hal ini juga menjadi tugas dari pemerintah desa, karena berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seorang kepala desa memiliki beberapa kewenangan salah satunya adalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, seluruh hierarki pemerintahan baik yang ada di tingkat atas hingga ke bawah memiliki peran untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi mengenai warganya yang menjadi Pekerja Migran Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif, teknik penentuan responden menggunakan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data, yakni melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan, yakni data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh desa menjadikan masyarakat tidak tertib dan tidak paham mengenai bagaimana prosedur yang seharusnya dilakukan dan dipenuhi. Begitu juga apabila terjadi permasalahan, desa tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada peraturan desa yang mengatur mengenai ketentuan dan sanksi.

Kata kunci: Pekerja Migran Indonesia, Desa, dan Kebijakan

ABSTRACT

The phenomenon of many people who go abroad to work, raises various problems. This can happen due to many factors, one of which is people who go through illegal or unofficial channels. Therefore, based on Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, which has delegated power and authority regarding the protection of people who will, are currently, or have become Indonesian Migrant Workers to local governments. Thus, local governments have the responsibility to carry out the task of protecting and supervising. This is also the duty of the village government, because based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, a village head has several authorities, one of which is the development and empowerment of village communities. Therefore, all government hierarchies, both at the top and bottom levels, have a role to play in overcoming the problems that are currently being faced regarding their citizens who become Indonesian Migrant Workers.

This study uses an exploratory approach, the technique of determining respondents using purposive sampling. Data collection techniques, namely through interviews, observation and documentation. The data used are primary data and secondary data.

The results showed that the absence of policies issued by the village made the community disorganized and did not understand how the procedures should be carried out and fulfilled. Likewise, if a problem occurs, the village cannot do much because there are no village regulations that regulate provisions and sanctions.

Keywords: Indonesian Migrant Workers, Villages, and Policy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan	7
1.4. Kegunaan	7
1.4.1. Kegunaan Teoritis	7
1.4.2. Kegunaan Praktis	8
1.5. Keaslian.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.6.1. Jenis Penelitian.....	12
1.6.2. Metode Pendekatan	13
1.6.3. Sumber Penelitian Data.....	13
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data	15
1.6.5. Metode Analisa Data.....	18
BAB II PERAN APARATUR PEMERINTAH DESA MENGENAI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	20
2.1. Pengaturan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	20
2.1.1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia	20
2.1.2. Pengertian Hukum tentang Pekerja Migran Indonesia.....	22
2.1.3. Asas-Asas Hukum Pekerja Migran Indonesia.....	24
2.1.4. Tujuan Pengaturan Pekerja Migran Indonesia	27
2.2. Kewenangan Desa dalam Pengaturan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	28
2.2.1. Pengertian Kewenangan.....	28
2.2.2. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	30
2.2.3. Dasar Hukum Kewenangan Desa serta Pengertian-Pengertian	36
BAB III PERAN APARATUR PEMERINTAH DESA MENGENAI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA AROSBAYA KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN BANGKALAN.....	41
3.1. Pengaturan Perlindungan dan Pengawasan Pekerja Migran Indonesia di Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan	41

3.2. Penanganan Permasalahan Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.....	48
---	----

BAB IV PENUTUP	57
-----------------------------	-----------

4.1. Kesimpulan	57
-----------------------	----

4.2. Saran.....	59
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	63
----------------------	-----------

BIODATA PENULIS.....	64
-----------------------------	-----------